



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/ 2021/Kpts/BPT-PS/ 2021,

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2021-2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya mengurangi risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan bencana secara tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 22 Februari 2021 yang dilaksanakan di Painan, perlu dilakukan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021-2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58

Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 22 Februari 2021 di Paiman;
 2. Berita Acara Tim Formatour Penyusunan Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 22 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2025, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :

1. bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
2. mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada setiap sektor pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. membangun database upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
4. monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Fungsi :

1. wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada sektor pembangunan di Pesisir Selatan;
2. wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, multi *stakeholder* dan masyarakat; dan
4. wadah *monitoring* dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan,
Pada tanggal, 29 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang; dan
4. Kepala Dinas dan Organisasi Terkait di Painan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 360/ 200/Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 29 MARET 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN

PESISIR SELATAN PERIODE 2021-2025

No	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
I. DEWAN PENGARAH			
1	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
2	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
3	Ermizen, S.Pd.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
4	Letkol. Inf. Gamma Arthadilla Sakti	Dandim 0311 Wirabraja Kabupaten Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
5	AKBP. Sri Wibowo, S.IK.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
6	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
7	Ir. H. Herman Budiarto	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
8	H. Asli Sa'an	Ketua Majelis Ulama Indonesia Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
9	Drs. H. Syafrizal, M.M. Dt. Nan Batuah	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pesisir Selatan	Dewan Pengarah
II. PENGURUS HARIAN			
1	Syafril Saputra, S.H.	Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
2	Sugeng Herianto, S.T.	Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
3	Yef Indra, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
4	Hamijon, S.P., M.Si.	Organisasi Amatir Radio Indonesia Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
5	Hardayanti, S.H., M.M.	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara

III. BIDANG REGULASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN			
1	Mahmud Yosrizal	Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Fadli Amra, S.H., M.M.	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Lahardi Piterson, S.T.	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
4	Hendra Lesmana	Komunitas Olahraga Menembak Pasisie Selatan	Anggota
5	Irdon, S.H.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Yuskardi, S.S.T., M.T.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Yonda Afrinaldo, S.H.I.	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Roza Afrila, S.T., M.Si.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Darmawi, S.Pd., M.Pd.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
IV. BIDANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN PENGUATAN KAPASITAS			
1	Dongki Agung Pribumi, S.S.T.P., M.M.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Hendri Agustian, S.Kep., M.M.	Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	drg. Norma Bayu Nita	Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	Amdani	Kodim 0311 Wirabraja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	dr. Muhammad Faisal	Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Dedi Afdal, Lc., M.Ud.	Sekolah Tinggi Agama Islam YPI Al Ikhlas Pesisir Selatan	Anggota
7	Arman	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Doni Boy, S.K.M., M.M.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Yunefil Efendi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

V. BIDANG PARTISIPASI DAN PELEMBAGAAN			
1	dr. Kurniadi, Sp.B.	Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Ridha Amalia Madya, S.S.I.T	Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Peبرا Nurpen	Sekolah Tinggi Agama Islam YPI Al Ikhlas Pesisir Selatan	Anggota
4	Adriansyah	Pegawai Bank Rakyat Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
5	Yusvianty, S.T., M.Si.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Drs. Fardimal	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Sugiarto	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Yuwizar, S.E.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Ivan A.R	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
VI. BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI			
1	Reky Putra	Radio Antar Penduduk Indonesia Pesisir Selatan	Ketua
2	Hasnul Karim, S.H.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Andi Kasianto, Amd.R.O.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	Herianto, S.H.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Sayaspani, Amd.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Didi Purnama	Komunitas Padang Adventure Club	Anggota
7	Kevin	Komunitas Ranah Jeep Club	Anggota
8	Rio Novriliam, Amd.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
VII. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI			
1	Kapten Arm. H. Hengky Gustian	Danramil 03/IV Jurai Kodim 0311 Wirabraja Pesisir Selatan	Ketua
2	dr. Reyantis Capanay	Rumah Sakit Umum	Anggota

		Daerah dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan	
3	Zaidina Umar, S.K.M., M.K.M.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	Dedi Hendra W	Komunitas Olahraga Menembak Pasisir Selatan	Anggota
5	Febi	Komunitas Ranah Jeep Club	Anggota
6	Erviyuni Faisal	Pegawai Bank Nagari Pesisir Selatan	Anggota
7	Wahyu R	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Budi Anugraha, S.H.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
VIII. SEKRETARIAT			
1	Wahyu Mursyid, S.Sos.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
2	Afrimon, S.H.	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Anggie Kurniawan, S.Pd.	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR